

**PERLINDUNGAN TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR  
MISKIN (STUDI DI DESA BALOHAO KECAMATAN ARAMO  
KABUPATEN NIAS SELATAN )**

Oleh:

Kalorus Kristianto Bu'ulolo <sup>1)</sup>

Marinus Laia <sup>2)</sup>

Muhammad Yasid Nasution <sup>3)</sup>

Ria Sintha Devi <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung Medan <sup>1, 2, 3, 4)</sup>

*E-mail :*

[kalorusb@gmail.com](mailto:kalorusb@gmail.com) <sup>1)</sup>

[marinuslaia674@gmail.com](mailto:marinuslaia674@gmail.com) <sup>2)</sup>

[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com) <sup>3)</sup>

[kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com) <sup>4)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to find out an overview of the poor, to find out how the strategy for handling the poor is in Balohao Village, Aramo District, South Nias Regency, to find out the role of the Balohao Village government, Aramo District, South Nias Regency in empowering the poor. This research belongs to the type of descriptive research with a qualitative approach. Qualitative research intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects, for example, behavior, perceptions, motivations, actions, etc. holistically, and in a descriptive way in the form of words and language in a special natural context and by utilizing various scientific methods. . The results of this study are (1). Poverty handling cannot only be solved by one sector and one party between the social, economic, educational, religious and legal fields which are needed in efforts to overcome poverty. This is not an easy job, even though it is the government's obligation to protect its citizens to obtain social welfare, support is still needed from the community itself both as a group and individually (2). All government policies will be very meaningless if they are not implemented in society. This embodiment certainly requires law enforcers who are fair and honest in carrying out their duties. If so, these characteristics will bring honor given by its citizens (3). The people referred to as the poor may not depend on all the facilities provided and given by the government, but people who have the will to escape the shackles of poverty and strive to not return to this group.*

**Keywords:** *Village Government, Legal Protection, Poor*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang fakir miskin, untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan fakir miskin di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan

oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara kelompok maupun secara perseorangan (2). Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penegak hukum yang adil, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya (3). Orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orang-orang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalam golongan tersebut.

**Kata Kunci : Pemerintah Desa, Perlindungan Hukum, Fakir Miskin**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan dan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin. Pokok-pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peraturan pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi warga negara agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna memajukan kesejahteraan umum tidak terlepas dari peran serta Negara. Negara memiliki kewajiban untuk dapat menggalangi kemiskinan termasuk memelihara fakir miskin. Sebagaimana dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Dari segi hukum, pembukaan UUD 1945, termasuk Pancasila, merupakan dasar konsep nasional yang menumbuhkan cita-cita hukum dan landasan sistem hukum yang merdeka yang berlandaskan semangat kebangsaan Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam pembentukan ketertiban nasional

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1 Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektoral yang memiliki sifat majemuk dan merupakan suatu kondisi yang harus segera diatasi untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat, karena masalah ini harus diselesaikan bersama dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 2 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bagi masyarakat fakir miskin dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 perlu dilakukan upaya perlindungan sosial (protection measures) yang mencerminkan pemenuhan kewajiban negara (state kewajiban). Ketentuan dalam amanat konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosialnya dan pemerintah berkewajiban melindungi kehidupan juga penghidupan rakyat Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang terjadi di masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin di Desa Balohao tahun 2019 sampai

kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat.<sup>3</sup> Di Desa Balohao Kabupaten Nias Selatan sendiri jumlah penduduk miskin dapat dikatakan meningkat sdari tahun ketahun dengan pesat pada dalam kurun waktu 2019-2021. yang mana pada tahun 2019 merupakan jumlah 1Ahmad Arif Widiyanto, Menjembatani Akses Masyarakat Miskin Pada Pelayanan Kesehatan Melalui Institusi Lokal, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volum 8, No 1, 2013, hlm 63. 2Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm.3 3 penduduk terkecil dengan status masyarakat miskin adalah 243 masyarakat. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat derastis berjumlah 250 masyarakat miskin dan pada tahun berikutnya dan menurun dengan jumlah 230 masyarakat. Secara lebih ringkas berikut adalah tabel masyarakat miskin di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. 2021 No Tahun Jumlah Masyarakat Miskin 1 2019 243 Masyarakat 2

2020 250 Masyarakat 3 2021 230  
Masyarakat.

Selain berdasarkan data di atas observasi awal yang dilakukan di Desa Balohao, ditemukan bahwa terdapat pembagian bantuan yang kurang sesuai dengan yang membutuhkan sehingga masyarakat melakukan Komplain baik itu kepada Kepala Dusun maupun kepada pihak Kepala Desa Balohao. Hal tersebut menjadi salah satu sebab penanganan Fakir Miskin di Desa Balohao menjadi kurang efektif. Dari hasil Observasi tersebut tampak jelas bagaimana sebenarnya sistem yang digunakan dalam penanganan fakir miskin dan juga dalam penyalurannya serta kendala yang pemerintah hadapi dalam upaya penanganan fakir miskin tersebut. Pemerintah Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan telah melakukan kebijakan dan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul. Salah satu kebijakannya yaitu menargetkan angka kemiskinan akan ditekan 7 % dari jumlah penduduk. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi angkakemiskinan di 4 Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan

Selatan. Salah satu faktor penyebab angka kemiskinandikarenakan terjadinya inflasi rupiah, sehingga daya beli masyarakat menurun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Kebijakan (keputusan) harus bertujuan untuk melahirkan maslahat (kebaikan) untuk meminimalisir krisis atau bencana. Kebijakan pemimpin terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat bagi rakyat (anggotanya). Dalam perspektif lebih luas menjelaskan bahwa prioritas untuk keamanan kesehatan global harus pada kegiatan kepemimpinan dan koordinasi yang membangun kapasitas kebijakan ditingkat makro, meso, dan mikro. 13 Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program program yang

kemudian diturunkan menjadi proyekproyek, dan akhirnya berwujud ada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. 14 13 Boynes Manurung. Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Kepala Sekolah Di Sma Negeri 20 Medan Di Era Covid-19. Jurnal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Vol 8, Nomor 3, 2021, hlm 9. 14Asna Aneta, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 1, 2010, hlm 56 12 Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan. 15 Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak miskin adalah pekerjaan yang fokus, komprehensif dan keras oleh

akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 2. Pengertian Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang penanganan kemiskinan. Berurusan dengan orang miskin ketentuan tersebut dirancang untuk menangani kemiskinan di Indonesia. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. 15 Asna Aneta, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 1, 2010, hlm 59 13 Penanganan fakir pemerintah, pemerintah daerah dan pembangunan berkelanjutan

memberdayakan masyarakat dalam bentuk kebijakan, rencana dan kegiatan, Bantuan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. 16 Penanganan fakir miskin haruslah berasaskan pada Keadilan sosial, Non diskriminasi, kemanusiaan, kesejahteraan, kesetiakawanan dan, pemberdayaan.<sup>17</sup>

3. Kemiskinan Kelompok orang-orang miskin itu memiliki budaya kemiskinan tersendiri, yang meliputi karakteristik Psikologis Sosial, dan Ekonomi. Liberal melihat kemanusiaan sebagai makhluk yang baik, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah adaptasi terhadap kenyataan dan situasi lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit. Radikal mereka mengabaikan budaya kemiskinan, tetapi menekankan pada peran struktur ekonomi, Politik dan masyarakat, dan pandangan bahwa manusia itu biologis kerjasama, produksi dan inovasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>24</sup> Adapun sumber data yang

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 21 Criswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional, Jurnal Pembangunan Daerah, Volume 8 No 03 2015 18 secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

22 2. Sifat Penelitian Pada metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa katakata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

23 3. Jenis Data dan Sumber Data Jenis peneliti yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (Field Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai macam data yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya adalah: 1. Bahan Hukum

Primer yaitu data yang diperoleh berupa peraturan perundang – undangan, dalam penelitian ini dipergunakan Kitab Undang- undang Perdata, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang NO 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan Pasal 2 dan 3. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 22 Lexy Moeleong J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.Hlm.16-27 23 Ibid, 55 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Reneka Cipta, 2017), hlm 102. 19 yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas aupun Buku-Buku, Jurnal serta Informasi dari Media. 2. Bahan Hukum Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia, bahan dari internet bibliografi dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang betul- betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain : 25 1. Observasi Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk unit,melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

mendapatkan data utama dalam menilai hubungan antara peneliti dan Desa yang akan diteliti tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan untuk di analisis dan pengecekan data kembali. 2. Wawancara Wawancara adalah situasi peran antara peribadi bertatap muka (face- to- face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penilitian kepada seseorang responden. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang 25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta Hlm. 72. 20 berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 4. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit- penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup> Analisis ini di gunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian.<sup>27</sup> Analisis ini untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya. Analisis Taksonomi, Analisis yang di gunakan terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah diciptakan. Setelah mengumpulkan data - data dilapangan mengemukakan permasalahan yang lebih mendalam yang mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses analisis ini terdapat tiga komponen utama yaitu: 1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup> 26 Sugiono, Metode Penelitian kombinasi. Bandung : ALFABETA,2018 Hlm.333. 27 Ibid,hlm.344. 28 Amiruddin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta Hlm. “orang yang sangat berkekurangan “orang yang sangat miskin,”orang yang

82 21 2. Display data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah display data atau penyajian data. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>29</sup> 3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian. kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas rumusan masalah. dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya. 30 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Karakteristik Fakir Miskin**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “miskin” di artikan dengan “tidak berharta benda”,“serba kekurangan” (berpenghasilan rendah)<sup>31</sup>. Sementara kata “fakir” mempunyai arti sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaa

n batin". Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Pendapatan yang rendah juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1999), h. 660. 32 Al-Asfahani, al-mufrdat fi Grarib al-quran (Terehan; Maktabah Nazar al-Musthafa alBaz, t.t), h. 312-23-24 Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki

jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya. Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin. Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal

ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. 25 Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya Balohao sendiri masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta dan petani

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Pada umumnya tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur kemiskinan adalah dengan melihat pendapatan dari masyarakat. Besarnya pendapatan dari masyarakat akan menentukan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Dari beberapa analisa dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti salah satu faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Balohao dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Di Desa merupakan sumber mata pencaharian yang paling besar dari masyarakat

desa 36 Balohao. Sebahagian besar masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta dan petani memiliki pendapatan yang belum bisa memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarganya secara baik dalam hal kebutuhan sandang, pangan dan papan atau dengan kata lain penghasilan masih di bawah rata rata sehingga masyarakat Desa Blohao belum sejahtera. Selain itu dari hasil wawancara peneliti lakukan faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Balohao dengan Bapak Andreas Y Giawa selaku Kepala Seksi Kesejahteraan di Kantor Desa Balohao yang mengatakan ada empat faktor yaitu: Lapangan pekerjaan, Sumber daya Manusia. Dimana beliau menjelaskan sebagai berikut: 1. Lapangan pekerjaan. Pengertian lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang mengangur artinya tidak tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan. Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau nama ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam

saja para pekerja menyadarkan sumber nafkahnya, jika di lihat dari status pekerjaan yang di miliki atau di lakukannya. Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan apa yang di kerjakan oleh pekerja yang bersangkutan, penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja yang mampu bekerja, usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 tahun dan di negara maju adalah 15 tahun, idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia Kualitasnya masih rendah karena sebagian besar 37 tingkat pendidikannya masih rendah. Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran di sebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk, Akan tetapi ada pula orang yang sudah bekerja tetapi di PHK. Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi di suatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran di mana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan struktur masyarakat secara tidak adil memberikan kesempatan yang sama

bagi setiap orang untuk mendapatkan aset ekonomi. Struktur ekonomi adalah sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat ketimpangan semakin parah di bidang ekonomi serta peluang usaha oleh masyarakat begitu minim akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan terjadinya pengangguran. a) Rendahnya pendapatan Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan perkapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variabel kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu di lihat karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang di pakai. 38 b) Tingkat Pengangguran Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan Negara harus menciptakan iklim dimana rakyat mempunyai usaha yang

kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu friksional, musiamal, struktur dan teknologis. Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Angkatan kerja terdiri dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara berkembang.

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin**

Negara juga berkewajiban membangun ekonomi rakyat dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih baik. dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan uang baitulmal.

Apabila daa beli masyarakat ada maka akan terasa memberatkan jika ekonomi mereka lemah.<sup>42</sup> Konsep welfare state atau social service-state, yaitu negara yang pemerintahan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anitesis dari konsep “negara penjaga malam“(nachtwachterstaat) yang tumbuh dan berkembang di abad ke-18 hingga pertengahan abad 19. Suatu negara kesejahteraan di butuhkan karena berlangsungnya perkembangan negara dan kemajuan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara dengan 12 alasan yaitu: 43 1. Meningkatkan standar kehidupan bagi semua. 2. Mengurangi waktu, bahaya, dan kebosanan kerja. 3. Memperbaiki ketidaksamaan kesempatan dan nasib yang diakibatkan oleh kelompok yang terjadi di masa lampau. 4. Membuka kesempatan karier tanpa memperhatikan asal-usulnya. 42 Junaidi lubis, sumber keuangan negara menurut islam (perspektif kitab al Kharaj),(Jakarta: baitul Hikmah Press, 2005),hlm 35 43 Ibid, hlm 44 48 49 5. Membentuk kelompok miskin, yang menderita, dan kesejahteraan Seiring berjalannya waktu, fungsi ini menjadi semakin

yang sakit, yang jompo, dan kelompok yang setara lainnya untuk memperoleh pendapatan dengan usaha mereka sendiri, yang dalam peraturan perundang-undangan di sebut sebagai standar hidup yang layak bagi diri sendiri. 6. Mendukung kelompok tertentu dalam perekonomian negara. 7. Mencegah depresi dan penggamgguran massal. 8. Menenangkan perselisihan antara kelompok/kelompok ekonomi serta antara pekerja dan pengusaha. 9. Melakukan konservasi sumber daya alam. 10. Mempertahankan eksistensi bangsa melalui angkatan bersenjata dan pertahankan rakyat dan melalui kontrol terhadap integrasi danperdagangan. 11. Menegakkan standar moralitas dasar tertentu (berkaitan dengan keluarga, perceraian, perkawinan, pencabulan, fitnah dan penghianatan, dan sebagainya). Negara mempunyai empat fungsi pokok, yaitu 1) fungsi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan Fungsi ini sangat penting terutama untuk mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antar warga negara. Fungsi melaksanakan ketertiban ini adalah untuk menata masyarakat sehingga tercipta kehidupan bangsa yang baik sesuai dengan cita-cita dan cita-cita Negara. 2) fungsi kemakmuran

penting, terutama bagi negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (elfare state).

### **C. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan**

Kecamatan Aramo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Aramo mencakup wilayah seluas 189 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang terdapat di kecamatan ini adalah kurang lebih 29.152 jiwa. Kecamatan Susua membawahi 18 desa yaitu Desa Aramo, Desa Bagoa, Desa Balohao, Desa Dao-dao, Desa Hiliadolowa, Desa Hiliamauzula, Desa Hilifadolo, Desa Hiligafoa, Desa Hiligumbu, Desa Hilimagiao, Desa Hilimbowo, Desa Hilimezaya, Desa Hiliorudua, Desa Hilitotao, Desa Hilitotao, Desa Hume, Desa Sikhorilafau, dan Desa Sisobambowo. Desa Balohao merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Aramo Kantor Desa Balohao terletak sebuah gugusan Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00.12'-1.32' Lintang Utara (LU) dan 970.00'-980.00' Bujur Timur (BT). Dengan

ketinggian rata-rata 0 - 600 meter diatas permukaan laut. Desa Balohao merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga dan membutuhkan waktu tempuh dari ibu kota Kabupaten Nias Selatan selama ± 2,5 jam dengan sepeda motor dan mobil (daerah Provinsi Sumatera Utara).

### **5. SIMPULAN**

Dari analisis penulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Balohao dari BAB I, II, III, dan IV diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri baik secara

kelompok maupun secara perseorangan.

2. Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleharganya.
3. Peran pemerintah Desa Balohao dalam pemberdayaan fakir miskin yaitu berbagai jenis bantuan yang selama ini disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial kepada Pemerintah Desa Balohao seperti PKH (Bantuan berupa uang, sembako, biaya pendidikan danUMKM)

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Lexyy Moeleong J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Muhtadi Ridwan, Geliat Ekonomi Islam, Malang : UIN Maliki Press, 2011
- Oscar Lewis, Kebudayaan Kemiskinan Dalam Kemiskinan Di Perkotaan, Di Edit Oleh Parsudi Suparla, Jakarta, Sinar Harapan Yayasan Obor, 1983

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika 2012.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Renerka Cipta, 2017.

Umar Nain, Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosio Historis, Makassar : Garis Khatulistiwa, 2019.

### **B. Jurnal, Skripsi dan Tesis**

Ahmad Arif Widiyanto, Menjembatani Akses Masyarakat Miskin Pada Pelayanan Kesehatan Melalui Institusi Lokal,

Jurnal Sosiologi Reflektif, Volum 8, No 1, 2013

Arifuddin, Omar Abdallah, Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berwawasan Lingkungan Di Muara Angke, Jakarta Utara, Tesis, Sekolah Pascasarjana. Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2017.

Asna Aneta, Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomo